

**ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI
PENERIMAAN PAJAK PENGHASILAN (PPh)**

DI KOTA SURABAYA

SKRIPSI



PRASTYO BANGUN NUSWANTARA
0411010021 / FE/EP

**FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN"
JAWA TIMUR**

2010

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan Kehadiran Allah SWT, yang telah memberikan Taufiq dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi dengan judul :

“Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) Di Kota Surabaya”.

Adapun maksud penyusunan skripsi ini adalah memenuhi salah satu persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Jurusan Ilmu Ekonomi Studi Pembangunan Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.

Dalam menyelesaikan skripsi ini tidak sedikit bantuan yang penulis peroleh dari Dr. Syamsul Huda, SE. MT, selaku Dosen Pembimbing, Dirjen Pajak Kanwil I Jawa Timur, Badan Pusat Statistik Surabaya Selatan, Disnaker Jawa Timur serta dari berbagai pihak, maka pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Ir. Teguh Sudarto, MP, selaku Rektor Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.
2. Bapak Dr. Dhani Ichsanuddin Nur, SE. MM, selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.
3. Drs. Ec. Marseto, DS. MSi, selaku Ketua Jurusan Ekonomi Pembangunan Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.

4. Dr. Syamsul Huda, SE. MT, selaku Dosen Pembimbing yang sabar memberikan petunjuk, masukan, bimbingan, dorongan, serta kritik yang bermanfaat bagi penulis sejak awal hingga terselesainya skripsi ini.
5. Bapak Dr. H. Djohan Mashudi, SE. MSi, selaku Dosen Wali.
6. Para Dosen & Staf Karyawan Fakultas Ekonomi Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.
7. Pimpinan beserta Staf Karyawan Dirjen Pajak Kanwil I Jawa Timur.
8. Pimpinan beserta Staf Karyawan Badan Pusat Statistik Surabaya Selatan.
9. Pimpinan beserta Staf Karyawan Disnaker Jawa Timur.
10. Terima kasih kepada kekasihku tercinta Oktavia Saputri dengan kesabarannya senantiasa menemani, memberikan semangat, serta do’a yang senantiasa diberikan kepada penulis setiap saat tanpa mengenal waktu.
11. Terima kasih secara khusus kepada Ayahanda Supriyono dan Ibunda Ninik, atas perhatian, kasih sayang, bimbingan, dan kesabarannya, serta do’a yang senantiasa diberikan kepada penulis setiap saat tanpa mengenal waktu yang tidak pernah penulis dapat membalas semuanya.

Barang kali ucapan terima kasih saja tidak cukup untuk membalas segala kebaikan yang diberikan kepada penulis, namun inilah yang hanya penulis sampaikan dari dasar sanubari yang tulus dan paling dalam, semoga Allah SWT berkenan memberikan berkah dan imbalan atas segala bantuan dari berbagai pihak.

Akhir kata tiada suatu yang patut penulis harapkan atas apa yang penulis telah lakukan kecuali saran dan kritik yang membangun dari segala pihak. Tiada pula kata yang penulis sampaikan kecuali manfaat atas segala kekurangan dan kesalahan penyajian dalam skripsi ini. Mudah – mudahan skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua kalangan yang memerlukan.

Surabaya, Januari 2010

Penulis

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar isi	iv
Daftar tabel	vii
Daftar gambar	viii
Abstraksi	ix
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Perumusan Masalah	6
1.3 Tujuan Penelitian	6
1.4 Manfaat Penelitian	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Penelitian Terdahulu	8
2.2 Landasan Teori	11
2.2.1. Pengertian Pajak	11
2.2.1.1 Fungsi Pajak	13
2.2.1.2 Pengelompokan Pajak	14
2.2.1.3 Asas-asas Pemungutan Pajak	15
2.2.1.4 Sistem Pemungutan Pajak	16
2.2.1.5 Tarif Pajak	17
2.2.2. Hubungan Tarif Pajak Dengan Penerimaan Pajak	19
2.2.2.1 Pajak Penghasilan	21
2.2.2.2 Subyek Pajak dan Wajib Pajak	21
2.2.2.3 Obyek Pajak	25
2.2.2.4 Tidak Termasuk Obyek Pajak	28
2.2.3. Pelaksanaan Pemungutan Pajak	29
2.2.4. Pajak dan Retribusi	30
2.2.4.1 Retribusi	30

2.2.4.2 Pajak	30
2.2.5. Pengertian Upah	31
2.2.5.1 Pengertian Rata-rata Upah Minimum Regional	32
2.2.6. Pengertian Teori Pendapatan Nasional	37
2.2.6.1 Pengertian Pendapatan Perkapita	40
2.2.7. Penduduk	41
2.3 Kerangka Pikir	43
2.4 Hipotesis	45

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

3.1. Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel	47
3.2. Teknik Penentuan Sampel	48
3.3. Teknik Pengumpulan Data	48
3.3.1 Jenis Data	48
3.3.2 Sumber Data	49
3.4. Teknik Analisa dan Uji Hipotesis	50
3.4.1 Teknik Analisa	50
3.4.2 Uji Hipotesis	51
3.5. Asumsi Klasik	54

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Deskripsi Obyek Penelitian	58
4.1.1 Kondisi Geografis	58
4.1.2 Kependudukan	59
4.2. Deskripsi Hasil Penelitian	60
4.2.1 Perkembangan Penerimaan Pajak Penghasilan	61
4.2.2 Perkembangan Jumlah Wajib Pajak	62
4.2.3 Perkembangan UMR	62
4.2.4 Perkembangan Pendapatan Perkapita	63
4.2.5 Perkembangan Jumlah Penduduk	64

4.3. Hasil Analisis Asumsi Regresi Klasik (BLUE)

Best Linier Unbiased Estimator	65
4.3.1 Analisis Dan Pengujian Hipotesis	69
4.3.2 Uji Hipotesis Secara Simultan	70
4.3.3 Uji Hipotesis Secara Parsial	72
4.3.4 Pembahasan	78

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan	80
5.2 Saran	82

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Perbedaan antara Wajib Pajak Dalam Negeri dan Wajib Pajak Luar Negeri	24
Tabel 2. Perkembangan Penerimaan Pajak Penghasilan Tahun 2000-2008	61
Tabel 3. Perkembangan Jumlah Wajib Pajak Tahun 2000-2008	62
Tabel 4. Perkembangan UMR Tahun 2000-2008	63
Tabel 5. Perkembangan Pendapatan Perkapita Tahun 2000-2008	64
Tabel 6. Perkembangan Jumlah Penduduk Tahun 2000-2008	65
Tabel 7. Tes Multikolinear	67
Tabel 8. Tes Heterokedastisitas dengan Korelasi Rank Spearman Korelasi	68
Tabel 9. Analisis Varian (ANOVA)	70
Tabel 10. Hasil Analisis Variabel Jumlah Wajib Pajak (X_1), Upah Minimum Regional (X_2), Pendapatan Perkapita (X_3), dan Jumlah Penduduk (X_4) terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan	72

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Kurva Laffler	20
Gambar 2. Kurva Penentuan Tingkat Upah dan Kesempatan Kerja Berdasarkan Pendekatan Tradisional Permintaan dan Penawaran Tenaga Kerja	36
Gambar 3. Kerangka Pikir	45
Gambar 4. Kurva Distribusi Penerimaan Atau Penolakan Hipotesis Secara Simultan	53
Gambar 5. Kurva Distribusi Penerimaan Atau Penolakan Hipotesis Secara Parsial	54
Gambar 6. Distribusi Daerah Keputusan Autokorelasi	56
Gambar 7. Distribusi Kriteria Penerimaan Atau Penolakan Hipotesis Secara Simultan Atau Keseluruhan	71
Gambar 8. Kurva Hasil Analisis Secara Parsial Faktor Jumlah Wajib Pajak (X_1) Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan (Y) ..	73
Gambar 9. Kurva Distribusi Hasil Analisis Secara Parsial Faktor Upah Minimum Regional (X_2) Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan (Y)	74
Gambar 10. Kurva Distribusi Hasil Analisis Secara Parsial Faktor Pendapatan Perkapita (X_3) Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan (Y)	75
Gambar 11. Kurva Distribusi Hasil Analisis Secara Parsial Faktor Jumlah Penduduk (X_4) Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan (Y)	77

ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENERIMAAN PAJAK PENGHASILAN (PPh) DI KOTA SURABAYA

Oleh Prastyo Bangun Nuswantara

Abstraksi

Adanya fluktuasi harga minyak bumi yang tidak menentu di pasaran dunia, maka Indonesia tidak dapat lagi mengandalkan sumber penerimaan dari sektor migas. Untuk itu pemerintah terus berusaha mencari alternative pembiayaan dalam negeri diluar sektor penerimaan migas sebagai sumber dana dalam meningkatkan kegiatan pembangunan. Gambaran tersebut menunjukkan betapa mendesaknya upaya peningkatan penerimaan dan sektor nonmigas khususnya pajak, yang diharapkan menjadi andalan utama dan dapat menggantikan sumber dan yang berasal dari migas.

Jenis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yaitu data yang bisa dikumpulkan atau diperoleh dari Badan Pusat Statistik Propinsi Jawa Timur, Dirjen Pajak Kanwil Jawa Timur I dan Dinas Tenaga Kerja Propinsi Jawa Timur selama 9 tahun mulai 2000-2008. Data yang dianalisis menggunakan model regresi Linear berganda yaitu suatu analisis untuk mengetahui masing-masing variable bebas (X) yang terdiri dari variable Jumlah Wajib Pajak, Upah Minimum Regional, Pendapatan Perkapita dan Jumlah Penduduk terhadap variable terikat (Y) yaitu Pajak Penghasilan baik secara simultan maupun secara parsial.

Berdasarkan hasil analisis dan pengujian hipotesis diperoleh hasil $F_{hitung} = (27,353) > F_{tabel} = 6,39$ maka H_0 ditolak dan H_a diterima, yang berarti bahwa secara keseluruhan faktor-faktor variable bebas yaitu Jumlah Wajib Pajak (X_1), Upah Minimum Regional (X_2), Pendapatan Perkapita (X_3), dan Jumlah Penduduk (X_4), berpengaruh secara simultan dan nyata terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan (Y). Sedangkan hasil Uji t secara Parsial variabel Jumlah Wajib Pajak berpengaruh secara nyata terhadap Pajak Penghasilan dengan nilai $t_{hitung} = 3,041 > t_{tabel} = 2,376$ maka H_0 ditolak dan H_i diterima, variabel Upah Minimum Regional berpengaruh secara nyata terhadap Pajak Penghasilan dengan nilai $t_{hitung} = 4,293 > t_{tabel} = 2,376$ H_0 ditolak dan H_a diterima, Pendapatan Perkapita berpengaruh secara nyata terhadap Pajak Penghasilan dengan nilai $t_{hitung} = 7,928 > t_{tabel} = 2,376$ maka H_0 ditolak dan H_a diterima, Jumlah Penduduk tidak berpengaruh secara nyata terhadap Pajak Penghasilan dengan nilai $t_{hitung} = 1,308 < t_{tabel} = 2,376$ H_0 diterima dan H_a ditolak.

Keyword : Jumlah Wajib Pajak, Upah Minimum Regional, Pendapatan Perkapita, Jumlah Penduduk, dan Pajak Penghasilan.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pembangunan dapat diartikan sebagai suatu upaya untuk menaikkan, mengembangkan dan memanfaatkan sumber daya yang tersedia, baik sumber daya alam maupun sumber daya manusia, bagi kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat yang sebesar-besarnya. Pembangunan harus dilaksanakan secara berkesinambungan dan terus menerus serta meluas untuk meningkatkan kemakmuran rakyat, kebutuhan dana untuk pembiayaan pembangunan dan keperluan rutin semakin meningkat sesuai dengan tingkat pertumbuhan ekonomi yang kita inginkan. Kebutuhan dana untuk pembiayaan pembangunan dan keperluan rutin diatur oleh pemerintah lewat keuangan negara. (Anonim, 1993 : 10)

Walaupun kebijaksanaan-kebijaksanaan pembangunan ekonomi selalu ditunjukkan untuk mempertinggi kesejahteraan dalam arti yang seluas-luasnya, kegiatan pembangunan ekonomi selalu dipandang sebagai bagian dari keseluruhan usaha pembangunan yang dijalankan oleh masyarakat untuk mengembangkan kegiatan ekonomi dan mempertinggi tingkat pendapatan masyarakat. Upaya meningkatkan pendapatan adalah suatu indikator terhadap perkembangan yang ingin dicapai dalam keseluruhan pembangunan. Dalam mengupayakan peningkatan pendapatan, pemerintah telah berprinsip bahwa arah kebijaksanaan

pembangunan adalah sejauh mungkin meningkatkan kemandirian dalam menggali dan mengembangkan sumber-sumber dana pembangunan dalam negeri serta mengupayakan penggunaan dana tersebut secara efisien. Kemandirian tersebut sangat penting bagi bangsa Indonesia.

Mengenai aspek kemandirian ini perlu disadari bahwa sumber kekuatan kemandirian akan ditentukan oleh kemampuan menggali dan memobilisasi berbagai sumber penerimaan dan pembiayaan pembangunan. Pada awal dekade 1980-an situasi perekonomian mulai menghadapi berbagai kendala, sebagai akibat kondisi lingkungan dunia internasional pada saat itu, antara lain :

1. Penurunan tingkat pertumbuhan ekonomi
2. Terjadinya inflasi
3. Nilai perdagangan dunia kurang meningkat
4. Arus dana luar negeri ke negara-negara berkembang menurun
5. Harga barang-barang primer semakin merosot
6. Harga minyak bumi dipasaran dunia tidak menentu dan cenderung semakin merosot

Diantara kondisi-kondisi tersebut diatas yang paling berpengaruh dalam kehidupan dan stabilitas perekonomian Indonesia adalah terjadinya fluktuasi harga minyak dipasaran dunia yang selanjutnya mempengaruhi nilai ekspor minyak bumi Indonesia dan hal ini menyebabkan penurunan penerimaan pemerintah dari sektor migas yang pada gilirannya berpengaruh pula terhadap kemampuan pemerintah dalam membiayai

pengeluarannya, baik pengeluaran rutin maupun pengeluaran pembangunan.

Adanya fluktuasi harga minyak bumi yang tidak menentu di pasaran dunia, maka Indonesia tidak dapat lagi mengandalkan sumber penerimaan dari sektor migas. Untuk itu pemerintah terus berusaha mencari alternative pembiayaan dalam negeri diluar sektor penerimaan migas sebagai sumber dana dalam meningkatkan kegiatan pembangunan.

Gambaran tersebut menunjukkan betapa mendesaknya upaya peningkatan penerimaan dan sektor nonmigas khususnya pajak, yang diharapkan menjadi andalan utama dan dapat menggantikan sumber dan yang berasal dari migas.

Hal ini sesuai dengan yang terkandung dalam Repelita V, yaitu unsur terbesar penerimaan diluar migas adalah penerimaan pajak. Dengan demikian kebijaksanaan perpajakan mempunyai peranan yang sangat menentukan dalam upaya penyediaan dana yang cukup bagi pelaksanaan pembangunan nasional. Penerimaan dari berbagai sumber perpajakan mutlak harus berhasil ditingkatkan secara berarti.

Perubahan sistem semacam ini (yang semula berorientasi pada minyak lalu dirubah dengan orientasi pajak) adalah wajar. Dalam proses pertumbuhan ekonomi suatu negara, perubahan struktur perekonomian mungkin saja terjadi. Salah satunya adalah perubahan dalam penerimaan negara. Perubahan penerimaan negara ini ditandai oleh peranan pajak

langsung terhadap total pajak semakin meningkat. sebaliknya pajak tidak langsung terhadap total pajak semakin menurun.

Sektor pajak mempunyai keunggulan dibanding dengan penerimaan lain, yaitu pajak berfungsi sebagai instrumen bagi distribusi pendapatan. Fungsi ini perlu disadari dan dilaksanakan, yaitu dengan mengalihkan sasaran pajak kepada pajak-pajak langsung. Sedangkan keunggulan lain dan sektor pajak bila dibandingkan dengan sektor migas adalah karena tidak menentunya harga migas dipasar dunia dan faktor sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Sedangkan kondisi di Indonesia sendiri dapat kita lihat bahwa semakin tahun kontribusi pajak terhadap penerimaan negara menunjukkan hasil yang semakin meningkat. Fakta seperti ini akan semakin mendukung upaya pemerintah dalam memaksimalkan penerimaan pajak sebagai penerimaan negara.

Dalam rangka menggali penerimaan sektor pajak, pemerintah telah mengupayakan penyempurnaan sistem perpajakan nasional, yaitu dengan diberlakukannya Undang-Undang Perpajakan baru yang dikenal dengan Reformasi perpajakan tahun 1983 yang mulai berlaku tanggal 1 Januari 1984 yang telah disempurnakan pada tahun 2000. Kebijakan ini pada hakekatnya merupakan suatu langkah perubahan yang mendasar antara lain, menyangkut sistem penerapan, sistem pemungutan, sistem sanksi, kemudahan dan kapasitas hukum. Langkah tersebut bertujuan untuk mengupayakan peningkatan penerimaan pajak baik melalui upaya intensifikasi maupun ekstensifikasi pemungutan pajak. Dalam upaya

intensifikasi yaitu, penggalan lebih dalam dan sumber-sumber penghasilan perpajakan. Memungkinkan penerimaan pajak meningkat. Demikian pula dalam upaya ekstensifikasi yaitu perluasan subyek maupun obyek pajak baru.

Dari tahun ke tahun penerimaan pajak sebagai salah satu sumber penerimaan dalam negeri semakin meningkat. ini menunjukkan bahwa potensi penerimaan pajak semakin meningkat dan masih dapat ditingkatkan lagi mengingat jumlah penduduk Indonesia yang begitu besar mempunyai potensi sebagai wajib pajak. Pajak Penghasilan (PPh) merupakan salah satu dari tiga komponen terbesar dan keseluruhan penerimaan pajak. Tiga komponen tersebut adalah Pajak Penghasilan, Pajak Bumi dan Bangunan dan Pajak Pertambahan Nilai. Pajak Penghasilan menempati urutan pertama dalam jumlah penerimaannya bila dibandingkan dengan jenis pajak yang lain. Dengan demikian Pajak Penghasilan adalah penyumbang terbesar dalam seluruh penerimaan pajak sebagai salah satu sumber penerimaan negara. (Anonim, 2000 : 5)

Berdasarkan data yang diperoleh dari Direktorat Jenderal Pajak Kantor Wilayah Jawa Timur I diketahui bahwa perkembangan Penerimaan Pajak Penghasilan di Surabaya dari tahun 2000 sampai pada tahun 2008 cenderung mengalami perkembangan yang dimulai tahun 2000 sampai tahun 2001 naik sebesar (392,59%), tahun 2002 turun sebesar (-21,19%), tahun 2003 turun sebesar (-2,04%), tahun 2004 naik sebesar (0,10%), tahun 2005 naik sebesar (5,79%), tahun 2006 naik sebesar (0,73%), tahun

2007 naik sebesar (0,92%), tahun 2008 naik sebesar (21.87%) perkembangan dari jumlah penerimaan pajak tersebut di sebabkan karena masih kurangnya sosialisasi pemerintah tentang pentingnya peran pajak terhadap pemerataan pembangunan serta masih terdapat kesenjangan pendapatan dan pembangunan di Surabaya. (Anonim, 2009 : 1).

Pemerintah saat ini menekankan pada program pemerataan untuk mengatasi kesenjangan pendapatan dan pembangunan. Oleh karena itu kebijaksanaan perpajakan di Indonesia memberlakukan pajak Penghasilan dengan berstruktur progresif. Pajak dikatakan progresif apabila pajak itu dikenakan dengan persentase yang semakin tinggi dengan semakin tingginya kemampuan membayar pajak. (Suparmoko, 1992 : 238).

1.2. Perumusan Masalah

1. Apakah faktor-faktor Jumlah Wajib Pajak, Upah Minimum Regional, Pendapatan Perkapita dan Jumlah Penduduk mempunyai pengaruh terhadap penerimaan pajak penghasilan (PPh) di Kota Surabaya?
2. Manakah dari ke-4 (empat) faktor yang paling dominan pengaruhnya terhadap penerimaan pajak penghasilan (PPh) di Kota Surabaya ?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengaruh Jumlah Wajib Pajak, Upah Minimum Regional, Pendapatan Perkapita, Jumlah Penduduk terhadap penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) di Kota Surabaya.

2. Untuk mengetahui manakah dari ke-4 (empat) faktor yang paling dominant pengaruhnya terhadap penerimaan pajak penghasilan (PPh) di Kota Surabaya.

1.4. Manfaat Penelitian:

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk digunakan :

1. Sebagai gambaran dan memberikan penjelasan mengenai perkembangan penerimaan pajak penghasilan di Kota Surabaya, serta adanya upaya-upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Tingkat II Surabaya dalam peningkatan Penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) .
2. Berdasarkan penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan dan informasi selanjutnya dalam pengambilan keputusan dan pertimbangan untuk menetapkan kebijaksanaan-kebijaksanaan fiskal dan perpajakan di Kota Surabaya.
3. Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi Fakultas Ekonomi UPN “Veteran” Jawa Timur untuk melengkapi perbendaharaan perpustakaan serta bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam penelitian lebih lanjut.